

## BAB VI

### SARAN

Berdasarkan hasil praktek kerja profesi yang telah dilaksanakan di Apotek Viva Grati, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mahasiswa program studi profesi apoteker perlu membekali diri dengan ilmu pengetahuan praktis yang berhubungan dengan pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan, undang-undang kefarmasian serta manajemen apotek sehingga pada waktu PKPA calon apoteker dapat langsung mengaplikasikan ilmu tersebut secara efektif dan efisien.
2. Mahasiswa program studi profesi apoteker hendaknya berperan aktif dalam melaksanakan semua kegiatan PKPA agar dapat memperoleh semua informasi dan pengalaman sehingga dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan dalam pelayanan dan pengelolaan apotek sehingga ketika terjun di masyarakat
3. Mahasiswa program studi profesi apoteker hendaknya memperlengkapi diri dengan kemampuan komunikasi yang baik sehingga mampu berkomunikasi dengan pasien, teman sejawat lain, maupun karyawan yang bekerja di apotek, baik yang merupakan tenaga teknis kefarmasian ataupun tidak
4. Mahasiswa program studi profesi apoteker sebaiknya lebih meningkatkan kemampuan dalam memberikan KIE kepada pasien untuk menjamin penggunaan obat dengan benar, aman, dan rasional sehingga tujuan terapi dapat tercapai serta

menghindari terjadinya kesalahan penggunaan obat dan penyalahgunaan obat.

**.DAFTAR PUSTAKA**

- Anderson, P. O., et al.,2002, Handbook of Clinical Drug Data, 10thedition, McGraw-Hill Companies, New York.
- Anonim, 2002, “Standar Kompetensi Apoteker Komunitas”, edisi II, BPP ISFI, Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Tenaga Kefarmasian, Departemen Kesehatan RI, Jakarta, 2011.
- Deglin, Judith Hopfer. (2004). Pedoman Obat untuk Perawat. Penerbit Buku Kedokteran EGC : Jakarta.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1027, 2004, Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Jakarta.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332, 2002, Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, Jakarta.
- Lacy, F.C., Lora, L.A., Morton, P.G., and Leonard, L.L., 2009, Drug Information Handbook 17<sup>th</sup> ed., American Pharmacists Association, New York.
- McEvoy, Gerald K., et all., 2011, AHFS Drug Information, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35, 2014, Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 919, 1993, Kriteria Obat Yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 51, 2009, Pekerjaan Kefarmasian, Jakarta.

- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1980, Tentang Apotek.  
Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 922/MENKES/PER/X/1993,  
Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor  
889/MENKES/PER/V/2011, Registrasi, Izin Praktik, dan Izin  
Kerja Tenaga Kefarmasian, Jakarta.
- Seto, S., N. Yunita., T. Lily, 2008, Manajemen Farmasi, Airlangga  
University Press, Surabaya.
- Sweetman, S.C., 2009, Martindale: The Complete Drug  
Reference 36<sup>th</sup> ed., Pharmaceutical Press, London.
- Tatro, D.S., et al, 2003, A to Z Drug Facts, Facts and Comparisons.
- Anonim, Informasi Spesialite Obat Indonesia, vol. 50, 2015/2016,  
PT. ISFI, Jakarta.
- Whalen, Karen., et al., 2015, Lippincott Illustrated Reviews  
Pharmacology 6<sup>th</sup> ed., Wolters Kluwer, Philadelphia.